

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tafsir al-Qur'an sejak awal kemunculannya tidak pernah berdiri dalam ruang kosong. Ia selalu hadir dalam situasi sosial, politik, dan budaya tertentu. Oleh karena itu, tafsir senantiasa merekam pergulatan pemikiran serta respons seorang mufasir terhadap realitas zamannya.¹ Penafsiran terhadap teks suci bukanlah aktivitas yang steril dari kepentingan dan keberpihakan, melainkan selalu mengandung corak tertentu yang menegaskan posisi seorang ulama dalam menghadapi tantangan kehidupan.² Dalam konteks ini, tafsir dapat dipahami bukan hanya sebagai produk ilmiah yang menjelaskan makna teks, melainkan juga sebagai refleksi yang lahir dari pergulatan intelektual, sosial, dan bahkan politik.³

Sejarah intelektual Islam memberikan bukti yang cukup banyak mengenai bagaimana tafsir dijadikan medium untuk merespons, menanggapi dan mengekspresikan sikap. Pada masa klasik, penafsiran yang dilakukan oleh at-Thabari, al-Zamakhshari, hingga Ibnu Katsir tidak bisa dilepaskan dari situasi politik-teologis yang melingkupinya. At-Thabari menulis tafsirnya dengan mengukuhkan corak *Sunni* yang sedang berupaya meneguhkan legitimasi teologi *Ahlu al-sunnah wa al-Jama'ah* di tengah

¹ Muhammad Nasir, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2010), 32.

² Abdul Mustaqim, "Pergeseran Epistemologi Tafsir: Dari Nalar Mitis-Ideologis Hingga Nalar Kritis", *Taswirul Afkar*, Vol. 18, No. 1 (2004), 101.

³ Muhamad Arif, *Penafsiran Al-Qur'an sebagai Kritik Sosial* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), 18.

perdebatan mazhab-mazhab besar pada masa itu.⁴ Sebaliknya, al-Zamakhshari, yang hidup dalam lingkungan *Mu'tazilah*, memberikan penekanan kuat pada dimensi rasional dan teologis khas mazhab tersebut dalam penafsirannya. Fakta-fakta historis ini menunjukkan bahwa tafsir merupakan produk historis yang selalu berinteraksi dengan konteks sosial dan politik.⁵ Dengan demikian, tafsir dapat dipahami sebagai teks yang hidup, bukan sekadar kumpulan interpretasi linguistik, melainkan juga refleksi keberpihakan dan sikap seorang *mufassir* terhadap realitas.

Pada era modern, peran tafsir sebagai medium pernyataan sikap semakin menonjol. *Mufassir* modern tidak hanya memfokuskan diri pada aspek filologis atau kebahasaan, melainkan menjadikan tafsir sebagai sarana untuk merespons tantangan zaman. Situasi kolonialisme, pertarungan ideologi, kemunculan negara-bangsa, serta pergeseran struktur sosial masyarakat Muslim telah melahirkan tafsir-tafsir yang sarat muatan kritik sosial dan politik.⁶ Dalam hal ini, tafsir tidak lagi dipahami hanya sebagai upaya memahami wahyu, tetapi juga sebagai bentuk artikulasi pemikiran yang sering kali bersifat kritis dan oposisional terhadap realitas ketidakadilan yang ada.

Sejarah mencatat, banyak ulama yang mengambil risiko dengan menjadikan tafsir sebagai media untuk menyuarakan kebenaran dan pemilihan sikap tertentu. Ibnu Taimiyyah, misalnya, beberapa kali

⁴ Moch. Shofiyulloh, "Metodologi Al-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan fi Ta'wili Al-Qur'an", *Indonesian Culture and Religion Issues*, Vol. 2, No. 1 (2025), 12.

⁵ Abdul Mustaqim, "Epistemologi Tafsir Kontemporer (Studi Komparatif antara Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur)" (Tesis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 12.

⁶ Muhammad Zia Al-Ayyubi, "Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Era Pra-Kolonialisme hingga Era Kolonialisme", *Rausyan Fikr*, Vol. 16, No. 1 (2021), 25.

mendapat tindakan represif karena pandangannya yang kritis terhadap kebijakan penguasa Mamluk, meskipun ia menegaskan bahwa pendapatnya bersumber dari penafsiran terhadap teks suci. Berikut perkataannya dalam karyanya *al-Ḥamawīyyah al-Kubrā*, yang menjadi pemicu awal fitnah, ia menegaskan:

فَإِنَّا نَقُولُ فِي الصِّفَاتِ مَا قَالَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَنُثَبِّتُ لِلَّهِ مَا أَتَيْنَاهُ لِنَفْسِهِ، وَنُنَزِّهُهُ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَعَيْبٍ، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ.

Maka kami mengatakan, dalam masalah sifat-sifat (Allah), apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kami menetapkan bagi Allah apa yang Dia tetapkan bagi diri-Nya, dan kami menyucikan-Nya dari segala keburukan dan cacat, tanpa distorsi (*tahrīf*) dan tanpa penolakan (*ta'tīl*), serta tanpa mempertanyakan “bagaimana” (*takyīf*) dan tanpa keserupaan dengan makhluk.⁷ Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam konteks Indonesia.

HAMKA hadir melalui Tafsir al-Azhar, menampilkan sebuah karya tafsir yang tidak hanya berbicara tentang akidah dan ibadah, tetapi juga mengandung dimensi kritik sosial-politik yang kental. Hal ini tampak jelas saat HAMKA menafsirkan surah al-Ma'un. HAMKA mengatakan:

Barangsiapa yang mendirikan shalat, tetapi tidak menghiraukan nasib anak yatim dan orang miskin, maka shalatnya masih di tingkat lahir saja, belum membekas di dalam jiwanya. Inilah gambaran orang yang agamanya hanya formalitas. Di zaman sekarang, banyak pemimpin yang rajin beribadah tetapi membiarkan rakyatnya sengsara. Mereka lupa bahwa agama menuntut keadilan dan kepedulian, bukan hanya ritual.⁸

Selain itu, HAMKA juga hidup pada masa yang penuh gejolak, ketika ideologi nasionalisme, komunisme, dan Islam saling bertarung untuk memperebutkan dominasi dalam negara yang baru merdeka.⁹ Situasi politik

⁷ Ahmad Ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, *al-'Aqīdah al-Ḥamawīyyah al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), 45.

⁸ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Jil. 10 (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1982), 7781.

⁹ M. Rahmat Effendi, “Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Antara Simbolistik dan Substantivistik”, *Mimbar*, Vol. 19, No. 1 (2003), 92.

Indonesia pada era 1950-an hingga 1960-an ditandai oleh meningkatnya otoritarianisme di bawah kepemimpinan Soekarno, terutama setelah pemberlakuan Demokrasi Terpimpin.¹⁰ Dalam kondisi seperti itu, suara-suara kritis sering kali dibungkam, dan banyak tokoh oposisi dijebloskan ke penjara. HAMKA sendiri menjadi salah satu korban situasi politik tersebut. Ia ditangkap pada tahun 1964 dengan tuduhan yang sarat muatan politis, dan mendekam di balik jeruji selama kurang lebih dua tahun.¹¹

Namun, di balik jeruji penjara itulah HAMKA justru menyelesaikan sebagian besar Tafsir al-Azhar.¹² Penjara, yang secara politik dimaksudkan untuk membungkam suara kritis, justru menjadi ruang lahirnya sebuah karya monumental yang hingga kini menjadi salah satu rujukan tafsir paling penting di Indonesia. Tafsir ini memperlihatkan bagaimana seorang *mufassir* menjadikan teks suci sebagai sarana untuk mengekspresikan sikapnya terhadap situasi sosial-politik. Hal ini tertuang dalam mukadimah Tafsir al-Azhar. HAMKA menegaskan bahwa tafsir harus berhubungan dengan realitas umat dan bukan hanya narasi keagamaan yang sifatnya ritual.¹³ Dalam beberapa bagian, HAMKA menyinggung persoalan keadilan, bahaya kesewenang-wenangan, serta ancaman penyembahan kepada selain Allah yang ia kaitkan dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan pada masa itu. Saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat: 8 HAMKA menuliskan bahwa “Keadilan adalah pintu yang terdekat kepada

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 129-130.

¹¹ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya HAMKA* (Jakarta Selatan: Noura, 2016), 262.

¹² HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Vol 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 5.

¹³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 17.

takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Tuhan. Apabila kamu telah dapat menegakkan keadilan, jiwamu sendiri akan merasai kemenangan. Lawan adil ialah zalim, dan zalim adalah salah satu dari puncak maksiat kepada Allah”.¹⁴

Pernyataan ini membuktikan bahwa menurut HAMKA, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan bukan sekadar masalah sosial, tetapi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap akidah yang mengiringi pelakunya pada penyembahan terhadap kekuasaan dan hawa nafsu. Kemudian, saat HAMKA menafsirkan Surah *al-Qashash* ayat: 4 yakni saat menjelaskan kisah *Fir'aun*, HAMKA menyampaikan sikapnya berupa kritik terhadap kekuasaan. Dalam tafsirnya ia menyampaikan: “Kisah *Fir'aun* bukan hanya cerita masa lalu. Tetapi merupakan cermin bagi segala zaman. Setiap kali manusia mempergunakan kekuasaan untuk menindas, maka di sanalah ada *Fir'aun*”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa HAMKA menggunakan tafsir sebagai medium untuk menyuarakan kebenaran, sarana oposisi untuk melawan, serta penolakan terhadap kebatilan. Meskipun ia menyadari risiko yang harus ditanggung.

Di sinilah konsep *Parrhesia* yang diperkenalkan oleh Michel Foucault menjadi relevan untuk memahami peran tafsir, khususnya tafsir al-Azhar milik HAMKA. *Parrhesia*, atau keberanian untuk berbicara terus terang, bukan hanya tindakan mengungkapkan kebenaran, tetapi juga

¹⁴ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Vol. 8, 78.

kesediaan untuk menghadapi risiko yang menyertainya.¹⁵ *Parrhesia* menuntut keberanian moral, sebab seseorang yang melakukan praktik ini sadar bahwa ucapannya bisa berbahaya bagi dirinya sendiri, tetapi ia tetap memilih untuk mengatakannya demi kebaikan publik. Jika diletakkan dalam konteks tafsir, seorang *mufassir* yang menggunakan penafsirannya untuk mengkritik ketidakadilan sosial, menentang tirani, atau menegaskan posisinya dengan memihak kepada yang lemah, sesungguhnya sedang menjalankan praktik *Parrhesia*. Ia menyuarakan kebenaran melalui medium tafsir, meskipun ia tahu bahwa konsekuensinya bisa berupa represi politik, stigma sosial, atau bahkan dipenjara.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tafsir memiliki dimensi risiko intelektual yang tidak dapat diabaikan. Risiko intelektual di sini dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari represi politik, stigmatisasi sosial, hingga sensor akademik. Seorang *mufassir* yang memilih jalur kritis sering kali dicap sebagai pembangkang, radikal, atau bahkan pengkhianat. Karyanya bisa dilarang beredar, dicabut dari percetakan, atau dihapus dari ruang publik. Dalam kasus yang lebih ekstrem, ia bisa dipenjara atau dihukum mati, sebagaimana dialami Sayyid Qutb.¹⁶ Namun, justru karena adanya risiko inilah tafsir sebagai pernyataan sikap menjadi penting. Keberanian untuk tetap menafsirkan dengan jujur, meskipun menghadapi risiko, membuktikan bahwa tafsir adalah arena perjuangan intelektual yang tidak bisa direduksi hanya menjadi teks keagamaan semata.

¹⁵ Michel Foucault, *Fearless Speech*, ed. Joseph Pearson (Los Angeles: Semiotext(e), 2001), 19.

Dengan demikian, penelitian tentang tafsir sebagai pernyataan sikap sangat penting untuk dilakukan. Tafsir perlu dipahami bukan hanya sebagai upaya intelektual dalam mengurai makna teks suci, tetapi juga sebagai bentuk keberanian moral seorang *mufassir* dalam menyuarakan kebenaran. Tafsir adalah ruang di mana teks suci dipertemukan dengan realitas sosial-politik, dan dalam pertemuan itulah lahir pernyataan sikap yang bisa menjadi oposisi terhadap kekuasaan. Seorang *mufassir* yang berani menempuh jalan itu tentu harus siap menanggung risiko, tetapi keberanian dan adanya risiko itulah yang menjadikan tafsir bukan hanya sebagai teks, melainkan juga sebagai tindakan intelektual yang sarat makna perjuangan.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi dan berfokus pada penafsiran HAMKA dalam tafsir al-Azhar sebagai objek utama dan mencoba menampilkan kondisi sosial-politik yang melingkupi tafsir tersebut. Penelitian ini juga tidak bermaksud mengulas seluruh penafsiran HAMKA dalam Tafsir al-Azhar, melainkan hanya menyoroti surah al-Maidah ayat: 1-2, 51, dan 55-56 yang mengindikasikan sebuah pernyataan sikap politik, yakni oposisi atau perlawanan melalui kacamata *Parrhesia*. Alasan difokuskannya penelitian ini terhadap penafsiran HAMKA yang mengandung pernyataan sikap politik adalah pentingnya membaca HAMKA dan Tafsir al-Azhar tidak hanya sebagai dokumen akademik atau karya keagamaan saja. Melainkan sebagai sebuah bentuk pernyataan sikap berupa perlawanan, pembebasan dan oposan walaupun dapat memicu tindakan represif yang penuh risiko. Hal ini akan menjadi sebuah rekam

jejak yang dapat diikuti oleh para sarjana Al-Qur'an. Yakni bahwa melalui penafsiran, kita juga dapat menyatakan sikap, berterus terang, dan melawan dengan merespons berbagai bentuk dinamika realitas yang ada.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial-politik yang melatarbelakangi penafsiran HAMKA terhadap QS. al-Maidah [5]: 1-2, 51, dan 55-56.
2. Bagaimana sikap kritis HAMKA dikonstruksi dalam penafsirannya menurut Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.
3. Bagaimana bentuk dan tingkat risiko yang dapat diidentifikasi dalam tindakan diskursif HAMKA berdasarkan konsep *Parrhesia* Foucault.

D. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi penafsiran HAMKA terhadap QS. al-Maidah [5]: 1-2, 51, dan 55-56.
2. Menganalisis konstruksi sikap kritis HAMKA menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.
3. Menilai sejauh mana penafsiran tersebut memenuhi unsur *Parrhesia* Michel Foucault.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada kajian tafsir Indonesia dengan menunjukkan bagaimana Analisis Wacana Kritis

Norman Fairclough dan konsep *Parrhesia* Michel Foucault dapat digunakan sebagai instrumen untuk membaca teks tafsir sebagai praktik wacana yang terhubung dengan konteks sosial-politik saat tafsir tersebut diproduksi. Penelitian ini juga memberikan contoh penerapan dua kerangka teori tersebut secara berurutan. Yakni AWK sebagai alat untuk membaca konstruksi wacana, kemudian *Parrhesia* sebagai instrumen penilaian unsur keberanian dan risiko.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman pembaca mengenai relasi antara tafsir al-Azhar dan konteks sosial-politik pada masa penulisannya, khususnya terhadap ayat-ayat politik. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji tafsir sebagai praktik wacana.

3. Manfaat Akademis

Sedangkan secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kajian tafsir dengan pendekatan wacana kritis, khususnya yang menghubungkan teks tafsir dengan konteks produksi sosial-politiknya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian tafsir khususnya tafsir al-Azhar di lingkungan akademik pesantren dan perguruan tinggi keagamaan Islam.

F. Tinjauan Pustaka

1. Kajian Seputar Tafsir al-Azhar

Dalam konteks kajian tafsir di Indonesia, nama HAMKA dan karyanya, Tafsir al-Azhar, menempati posisi penting. Tafsir ini tidak hanya merefleksikan pengetahuan mendalam HAMKA tentang Al-Qur'an dan tradisi Islam, tetapi juga menyerap serta merefleksikan kondisi sosial, politik, dan budaya Indonesia pada pertengahan abad ke-20. Selain itu, proses penulisan tafsir ini juga sarat dimensi historis yang menggambarkan keberanian HAMKA sebagai seorang ulama. Sebagian besar tafsir ditulis pada masa HAMKA mendekam di penjara akibat konflik politik dengan rezim Sukarno (1964-1966). Kondisi ini menegaskan bahwa karya tafsirnya lahir bukan dalam situasi yang bebas dari tekanan, melainkan di tengah situasi represif. Justru dalam keadaan demikian, HAMKA tetap tampil sebagai truth-teller yang menyampaikan kritik sosial dan moral melalui tafsirnya.¹⁷

Islah Gusmian menekankan bahwa Tafsir al-Azhar merepresentasikan corak tafsir berciri sosial-politik yang kuat, di mana ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi bangsa dan negara.¹⁸ Kemudian M. Quraish Shihab (1994), menilai HAMKA sebagai mufasir yang tidak hanya menafsirkan ayat untuk kepentingan ritual keagamaan, tetapi juga untuk melakukan reformasi sosial.¹⁹

¹⁷ HAMKA, *Kenang-kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 289-292.

¹⁸ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 211.

¹⁹ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 142.

Sementara itu, penelitian di lingkungan perguruan tinggi juga menunjukkan bahwa HAMKA berupaya melakukan *kontekstualisasi* tafsir dengan mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an terhadap situasi bangsa setelah kemerdekaan. Seperti skripsi karya Ariq Hidayat yang berjudul *Kritik Buya HAMKA terhadap Pemerintah Orde Lama dari Tahun 1959 sampai Tahun 1966 dalam Tafsir al-Azhar*. Skripsi ini berfokus pada bagaimana HAMKA menggunakan Tafsir al-Azhar sebagai medium untuk mengkritik kebijakan dan kondisi pemerintahan Orde Lama (1959–1966), terutama dalam aspek keadilan hukum, kekuasaan politik, dan situasi sosial masyarakat.²⁰ Hal ini berbeda dengan penulis, Skripsi karya Ariq Hidayat hanya merangkum dan menampilkan bukti kritik HAMKA dalam Tafsir al-Azhar terhadap pemerintahan Orde Lama tanpa meninjau lebih jauh bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah pernyataan sikap oposisi HAMKA. Sehingga, penelitian tersebut tidak menyoroti sisi keterusterangan HAMKA, keberanian dan risiko yang ditanggungnya. Tentu hal ini disebabkan oleh berbedanya pisau analisis yang digunakan. Skripsi Ariq Hidayat ini menggunakan teori *Content Analysis*, yakni mencoba mengidentifikasi dan menginterpretasi makna dari teks tafsir HAMKA, menelusuri ayat-ayat yang mengandung kritik terhadap pemerintah Orde Lama, kemudian mengklasifikasikan tema kritik berdasarkan kata kunci seperti *rahmat*, *perkataan kosong*, dan *ahli-ahli kitab*.²¹

²⁰ Ariq Hidayat, “Kritik Buya HAMKA terhadap Pemerintah Orde Lama dari Tahun 1959 sampai Tahun 1966 dalam Tafsir al-Azhar” (Skripsi di UIN Imam Bonjol Padang, 2021), 9.

²¹ Ibid., 37.

Selanjutnya, tesis Irfan Hazri tentang *Kontekstualisasi Penafsiran HAMKA dalam Tafsir al-Azhar (Studi Analisis Penafsiran Term Qawlan)*.²² Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah pada fokus pembahasannya. Penelitian ini berfokus pada penguraian term *qawlan* dalam Tafsir HAMKA dengan menampilkan beberapa makna kontekstualisasi dari term *qawlan* dengan menggunakan metode tematik. Hal ini didasari oleh kemunculan tafsir HAMKA di era kontekstual-transformatif, sehingga peneliti tersebut hendak membuktikan apakah dalam tafsir HAMKA terdapat hal tersebut. Kemudian perbedaan juga terletak dalam penggunaan pisau analisis yang digunakan. Analisis tematik sangat berbeda dengan analisis *Parrhesia*. Tematik hanya berfokus pada analisis kata yang dikumpulkan berdasarkan tema, sedangkan *Parrhesia* memiliki fokus pada sikap seseorang dalam kondisi tertentu. Oleh sebab perbedaan pisau bedah yang digunakan, hasil dan kesimpulan yang muncul pun memiliki perbedaan.

Selain itu, terdapat juga penelitian lain mengenai tafsir HAMKA, yakni disertasi karya Ach. Jamiluddin dengan judul *Transformasi Sosial Qur'anik Dalam Tafsir al-Azhar*. Fokus kajian ini menjelaskan bagaimana HAMKA, melalui Tafsir al-Azhar, merumuskan Islam sebagai kekuatan transformatif sosial berdasarkan al-Qur'an. HAMKA menafsirkan ulang teologi Islam agar lebih aplikatif dan

²² Irfan Hazri, "Kontekstualisasi Penafsiran HAMKA dalam Tafsir al-Azhar (Studi Analisis Penafsiran Term Qawlan)" (Tesis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), Abstrak.

membangkitkan kesadaran manusia akan peran sosialnya di bumi, bukan sekadar perdebatan spekulatif teologis.²³ Setelah itu, HAMKA merumuskan aksi sosial melalui tiga pilar: *ta'murûna bil ma'rûf, tanhauna 'an al-munkar*, dan *tu'minûna bil Lâh*, dengan penekanan pada iman sebagai landasan perubahan.²⁴ Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan penulis dalam membedah Tafsir al-Azhar. Disertasi tersebut hendak membahas bahwa perubahan sosial dapat dilakukan melalui penafsiran Al-Qur'an dengan gaya transformatif Qur'anik, yakni menafsirkan teks dengan penafsiran transformatif. Penelitian tersebut tidak memandang HAMKA sebagai seorang *oposan* yang melakukan tindakan kritis terhadap dinamika sosial-politik masa itu. Sehingga hanya berhenti pada titik transformatif dalam tafsir HAMKA, tanpa memandangnya sebagai sikap yang diambil HAMKA terhadap dinamika yang ada.

Selanjutnya disertasi karya Ilyas Daud dengan judul *Kritik HAMKA Atas Komunisme Dalam Tafsir al-Azhar (Tinjauan Strukturalisme Genetik)*. Penelitian ini mencoba membongkar struktur internal tafsir yang mengkritik komunisme dalam tafsir al-Azhar. Kemudian menelusuri struktur sosial sebagai genetika tafsir.²⁵ Hal ini juga berbeda dengan penulis dalam membaca Tafsir al-Azhar karya HAMKA. Penelitian tersebut hanya menampilkan kritik terhadap komunisme yang

²³ Ach. Jamiluddin, "Transformasi Sosial Qur'anik dalam Tafsir al-Azhar" (Disertasi di Institut PTIQ Jakarta, 2019), 3.

²⁴ Ibid., 3.

²⁵ Ilyas Daud, "Kritik HAMKA atas Komunisme dalam Tafsir al-Azhar (Tinjauan Strukturalisme Genetik)" (Disertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 9.

terdapat dalam Tafsir al-Azhar sebagai sebuah bentukan dari struktur sosial, tidak sedikit pun melihat kritik tersebut sebagai sebuah sikap yang diambil HAMKA, juga tanpa menyertakan risiko yang akan ditanggungnya. Tentu hal ini disebabkan oleh perbedaan pisau analisis yang digunakan, sehingga menghasilkan produk yang berbeda pula.

Selanjutnya, Basri, menekankan bagaimana HAMKA dalam Tafsir al-Azhar mengedepankan prinsip kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama, terutama dalam menafsirkan ayat “*lā ikrāha fi al-dīn*” (QS. al-Baqarah: 256).²⁶ Hal ini menunjukkan keberanian HAMKA untuk menolak arus konservatif yang menjustifikasi pemaksaan agama. Kajian ini pun berbeda dengan penulis dalam memandang tafsir al-Azhar karya HAMKA. Kajian tersebut mengungkap bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama melalui studi analisis tafsir HAMKA. Walaupun terdapat sisi keberanian HAMKA, penelitian tersebut tidak menganggap keberanian sebagai sebuah sikap yang dipilih HAMKA dengan berbagai macam risiko yang dihadapinya. Selain itu, pisau analisis yang digunakan juga berbeda dari penulis. Implikasinya adalah pola penelitian yang berbeda dengan hasil yang berbeda pula.

Selanjutnya, skripsi karya Rizky Muhammad Aulia dengan judul *Kritik Mohammad Hatta Dan HAMKA Terhadap Kekuasaan Soekarno Dalam Demokrasi Terpimpin (1959-1966)*. Skripsi ini berusaha

²⁶ B. Basri dan M. Muhammad, “Rethinking Religious Moderation through the Study of Indonesian Exegesis: A Study of Tafsir al-Azhar by HAMKA”, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 21, No. 1 (2023), 45-47.

menggabungkan dan membandingkan kedua perspektif tersebut dalam satu kajian yang lebih komprehensif. Dengan memadukan kritik Hatta dan HAMKA, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana dua tokoh dengan latar belakang berbeda memiliki kesamaan dalam menolak pemusatan kekuasaan oleh Soekarno, serta bagaimana kritik mereka dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dampak Demokrasi Terpimpin terhadap kehidupan politik dan sosial di Indonesia.²⁷ Perbedaannya dengan penulis tampak jelas, yakni hanya menampilkan narasi kritik HAMKA tanpa memandangnya sebagai sebuah pernyataan sikap yang melawan, oposisi terhadap kekuasaan atau ideologi yang mapan.

Kemudian artikel "*Methodology of Interpreting HAMKA in the Tafsir al-Azhar*" menegaskan bahwa HAMKA memadukan metode *tahlili*, pendekatan *adab ijtima'i*, serta corak kontekstual yang menjadikan tafsirnya relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.²⁸ Kajian ini juga memiliki perbedaan dari segi fokus pembahasan dan teori yang digunakan.

Selanjutnya, artikel dari Muhammad Husein dengan judul *Kontroversi Pandangan Nilai Pluralisme Atas Tafsir HAMKA*. Artikel ini coba menggali penafsiran HAMKA terhadap ayat Pluralisme,

²⁷ Rizky Muhammad Aulia, "Kritik Mohammad Hatta dan HAMKA terhadap Kekuasaan Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin (1959-1966)" (Skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025), 7.

²⁸ Mukhamad Hadi Musolin, Reda Owis Hassan Serour, dan Mohamed Fathy Mohamed Abdelgelil, "Methodology of Interpreting HAMKA in the Tafsir al-Azhar", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 14, No. 11 (2024), 2458-2463.

khususnya pada ayat 62 surah al-Baqarah. Kemudian menampilkan beberapa pandangan yang pro dan kontra terhadap Pluralisme dalam penafsiran HAMKA ini.²⁹ Berbeda, dengan penulis, artikel ini hanya fokus pada ayat-ayat pluralisme yang ditafsirkan HAMKA, kemudian menampilkan beberapa tokoh yang setuju dan menolak makna pluralisme yang dimaksud HAMKA dalam tafsirnya. Perbedaan fokus pembahasan dan pisau analisis yang digunakan menjadikan artikel ini tampak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Selanjutnya, artikel karya Kamal Azmi Abd Rahman dan Sharifah Nur Aminah Sayyid Kassim yang berjudul *Idea-Idea Kritikan Sosial HAMKA Di Dalam Novel Teggelamnya Kapal Van Der Wijck*. Artikel ini membahas idea-idea kritikan sosial yang terdapat dalam novel *Tenggelmnya Kapl Van Der Wijck* (TKvdW). Artikel ini mengungkap bahwa TKvdW adalah sebuah novel HAMKA yang bernuansa percintaan, tetapi bertujuan untuk menyampaikan kritikan sosial dalam kehidupan masyarakat yang bersuku dan beradat. Objek kajian dalam artikel ini jelas berbeda dan alat analisis yang digunakan juga berbeda. Walaupun menampilkan kritik sosial HAMKA, tetapi tidak memandangnya sebagai sebuah bentuk perlawanan yang memiliki risiko atau sebuah tindakan oposisi dan sikap yang dipilih.

²⁹Muhammad Husein, "Kontroversi Pandangan Nilai Pluralisme atas Tafsir HAMKA", *Syntax Imperatif*, Vol. 5, No. 4 (2024), 782.

2. Parrhesia

Sementara itu, dalam wacana Islam sendiri, gagasan tentang keberanian menyampaikan kebenaran bukanlah hal asing. Sejumlah pemikir Muslim modern, seperti Ebrahim Moosa, pernah menyinggung peran ulama sebagai penutur kebenaran (*truth-tellers*) dalam sejarah Islam.³⁰ Bahkan dalam tradisi klasik sekalipun, kisah para Nabi sering kali ditampilkan sebagai contoh figur-figur *Parrhesiastes* yang berbicara menentang penguasa zalim.³¹ Namun, hubungan eksplisit antara *Parrhesia* Foucaultian dengan tafsir di Indonesia, khususnya karya HAMKA, masih relatif dan tidak pernah dilakukan.

Terdapat beberapa penelitian mengenai *Parrhesia* yang sudah dilakukan. Misalnya, Skripsi karya Victorinus Roja yang berjudul “Relevansi Konsep Parrhesia Michel Foucault Terhadap Upaya Pencegahan Hoaks Di Indonesia”. Penelitian ini berusaha mengungkap bahwa *Parrhesia* menurut Michel Foucault relevan terhadap upaya pencegahan *hoaks* di Indonesia. Ketika berbagai upaya yang selama ini telah dijalankan masih belum berhasil mencegah dan menyedikitkan dampak yang ditimbulkan oleh *hoaks*, maka konsep *Parrhesia* Michel Foucault dapat menjadi *problem solving*.³² Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maria Matildis Banda dengan judul “Wacana Kekuasaan Dan Kebenaran Dalam Puisi Lisan Sa Ngaza (The Discourse Of Power

³⁰ Ebrahim Moosa, *Ghazali and the Poetics of Imagination* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005), 20.

³¹ Ali Shariati, *Religion versus Religion* (t.tp.: t.np., t.th.), 53-55.

³² Victorinus Roja, “Relevansi Konsep Parrhesia Michel Foucault terhadap Upaya Pencegahan Hoaks di Indonesia” (Skripsi di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021), Abstrak.

And Truth In The Oral Poetry Sa Ngaza)”. Penelitian ini berusaha menjelaskan bahwa pada era post-modern, puisi yang indah dan berguna saja tidak cukup. Puisi lisan perlu dikaji demi keberlangsungan tradisi dan pembentukan karakter. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori kekuasaan dan kebenaran menurut Foucault. Lebih lanjutnya adalah bahwa wacana kekuasaan dan kebenaran dalam puisi lisan sebagai *Parrhesia* dan *Parrhesiasist* memerlukan sejumlah modal. Modal dapat mendukung *Sa Ngaza* agar memiliki pengaruh dan dominasi demi keberlanjutan tradisi dalam era postmodern. Hubungan antara *Parrhesia* dan *parresiasist* tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan, kekuasaan, dan kebenaran asal-usul sub-etnis pemilik *Sa Ngaza*.³³

Sejauh penelusuran penulis, kajian-kajian di atas belum secara spesifik menghubungkan kritik HAMKA sebagai sebuah pernyataan sikap politik dengan analisis teori *Parrhesia* yang ditawarkan Foucault. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu cenderung memusatkan perhatian pada aspek metodologi, moderasi, transformasi dan kontekstualisasi yang memiliki nilai kritik. Namun, belum terdapat penelitian yang secara eksplisit membaca penafsiran HAMKA dengan perspektif *Parrhesia* milik Foucault sebagai sebuah pernyataan sikap politik dan perlawanan intelektual yang memiliki risiko.

³³ Maria Matildis Banda, “Wacana Kekuasaan dan Kebenaran dalam Puisi Lisan Sa Ngaza (The Discourse of Power and Truth in the Oral Poetry Sa Ngaza)”, *Mozaik Humaniora*, Vol. 17 (2017), 126.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menutup celah tersebut. Kajian ini memosisikan Tafsir al-Azhar bukan hanya sebagai karya tafsir monumental yang memuat penjelasan keagamaan, tetapi juga sebagai praktik *Parrhesia*, yakni keberanian HAMKA dalam menyuarakan kebenaran melalui medium tafsir yang mana hal tersebut merupakan pemilihan sikap yang diambil oleh HAMKA. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menekankan aspek metodologis atau corak penafsiran, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan membaca keberanian dan keterusterangan HAMKA dalam bingkai *Parrhesia*.

G. Kerangka Teori

1. Analisis Wacana Kritis

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pisau bedah analisis wacana yang digagas oleh Norman Fairclough. Penulis berusaha untuk memahami wacana yang terkandung dalam penafsiran HAMKA. Dalam Analisis Wacana yang digagas oleh Fairclough dijelaskan bahwa pemakaian bahasa lisan dan tulisan merupakan praktik sosial. Praktik sosial dalam analisis wacana dipandang menyebabkan hubungan yang saling berkaitan antara struktur sosial dan proses produksi wacana. Dalam memahami wacana (naskah atau teks) kita tak dapat melepaskan dari konteksnya. Untuk menemukan "realitas" di balik teks diperlukan

penelusuran atas konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi pembuatan teks³⁴.

Fairclough berpendapat ada dialektik antara sosial dan wacana. Wacana mempengaruhi tatanan sosial, demikian juga tatanan sosial mempengaruhi wacana. *Pertama*, *discourse* membentuk dan dibentuk oleh masyarakat. *Kedua*, *discourse* membantu membentuk dan mengubah pengetahuan beserta objek-objeknya, hubungan sosial, dan identitas sosial. *Ketiga*, *discourse* dibentuk oleh hubungan kekuasaan dan terkait dengan ideologi. *Keempat*, pembentukan *discourse* menandai adanya tarik ulur kekuasaan. Dengan demikian, model analisis wacana yang dikembangkan oleh Fairclough disebut dengan Pendekatan Relasi Dialektik (Dialectical-Relational Approach atau DRA) atau biasa juga disebut dengan pendekatan perubahan sosial.³⁵

Konsep yang dibentuk oleh Fairclough menitikberatkan pada tiga level. *Pertama*, setiap teks secara bersamaan memiliki tiga fungsi, yaitu representasi, relasi, dan identitas. *Kedua*, praktik wacana meliputi cara-cara para pekerja media memproduksi teks. Hal ini berkaitan dengan wartawan itu sendiri selaku pribadi, sifat jaringan kerja wartawan dengan sesama pekerja media lainnya, pola kerja media sebagai institusi, seperti cara meliput berita, menulis berita, sampai menjadi berita di dalam media. *Ketiga*, praktik sosial-budaya menganalisis tiga hal yaitu ekonomi, politik (khususnya berkaitan dengan isu-isu

³⁴ Umar Fauzan, *Analisis Wacana Kritis: Mengungkap Ideologi dalam Wacana* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 32.

³⁵ Ibid., 33.

kekuasaan dan ideologi) dan budaya (khususnya berkaitan dengan nilai dan identitas) yang juga mempengaruhi institusi media dan wacananya.³⁶ Pembahasan praktik sosial budaya meliputi tiga level, yaitu level situasional, institusional, dan sosial. Level situasional berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya. Level institusional berkaitan dengan pengaruh institusi secara internal maupun eksternal. Level sosial berkaitan dengan situasi yang lebih makro, seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya masyarakat secara keseluruhan.

2. *Parrhesia*

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan kerangka teori *Parrhesia* yang dipopulerkan oleh Michel Foucault. *Parrhesia* berasal dari bahasa Yunani kuno (*parrhēsia*) yang berarti berbicara dengan terus terang atau berkata apa adanya.³⁷ Konsep ini kembali populer setelah dibahas oleh Michel Foucault dalam kuliah-kuliahnya di Collège de France pada awal 1980-an kemudian diterbitkan dengan judul *Fearless Speech* (2001).³⁸ Foucault menyebut *Parrhesia* sebagai praktik etis-politik, di mana seseorang menjadi pemberani dalam kebenaran (*the courage of truth*).³⁹ Jadi, *Parrhesia* adalah praktik mengatakan kebenaran secara terbuka, bahkan ketika kebenaran tersebut dapat

³⁶ Ibid., 33.

³⁷ Foucault, *Fearless Speech*, 12-19.

³⁸ Ibid., 12-19.

³⁹ Michel Foucault, *The Courage of Truth: The Government of Self and Others II, Lectures at the Collège de France 1983-1984*, ed. Frédéric Gros, terj. Graham Burchell (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 66-68.

menimbulkan risiko bagi yang menyampaikannya.⁴⁰ *Parrhesia* tidak hanya sekadar berkata jujur, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, kebebasan untuk memilih berbicara, serta kesediaan untuk menghadapi konsekuensi sosial maupun politik.⁴¹ Dalam kerangka ini, seorang *Parrhesia* adalah sosok yang berani berbicara melawan ketidakadilan, sekalipun ia berpotensi ditolak, dibungkam, atau bahkan dihukum. Dengan demikian, *Parrhesia* tidak hanya berkaitan dengan isi ucapan, tetapi juga dengan keberanian, tanggung jawab, dan risiko yang diterima oleh pelaku *Parrhesia*.

Unsur-unsur dalam *Parrhesia*:

a. Kebenaran (*truth-telling*)

Orang yang melakukan *Parrhesia* adalah mereka yang menyatakan sesuatu dan meyakini kebenarannya, bukan sekadar opini yang dibuat-buat atau ucapan yang ditujukan untuk menyenangkan hati orang lain.⁴²

b. Keterusterangan

Seorang *Parrhesia* menyampaikan kebenaran dengan berterus terang, jelas dan tidak manipulatif. Keterusterangan tidak selalu berbicara dengan bahasa yang kasar. Seseorang tetap dapat melakukan *Parrhesia* dengan bahasa yang santun dan satir, selama

⁴⁰ Foucault, *Fearless Speech*, 11-12.

⁴¹ Michel Foucault, *Discourse and Truth: The Problematization of Parrhesia*, ed. Henri-Paul Fruchaud dan Daniele Lorenzini (Chicago: University of Chicago Press, 2019), 14-18.

⁴² Foucault, *Fearless Speech*, 14.

inti dari kebenaran yang disampaikan tidak ditutupi dan dimanipulasi.⁴³

c. Kritik

Seorang *Parrhesia* tidak hanya menyampaikan sesuatu yang diyakininya benar, tetapi menjadikan kebenaran tersebut sebagai untuk mengkritik kesalahan, ketidakadilan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

d. Risiko (danger)

Kebenaran itu biasanya diarahkan kepada pihak yang berkuasa atau masyarakat luas, sehingga berpotensi menimbulkan risiko. Misalnya, dikucilkan, diasingkan, bahkan penolakan sosial.⁴⁴

e. Tanggung jawab moral

Parrhesia bukan sekadar berani bicara, tetapi berani bicara demi kebaikan publik. Ia adalah kewajiban moral, bukan sekadar hak. Oleh karena itu, *Parrhesia* bukan sekadar kebebasan berbicara, melainkan suatu tanggung jawab moral untuk mengatakan kebenaran dengan berterus terang meskipun ucapan itu berisiko menimbulkan bahaya, ancaman, dan represi politik bagi pembicara.⁴⁵

Kerangka *Parrhesia* di atas akan digunakan sebagai instrumen analisis untuk menguji apakah penafsiran HAMKA terhadap ayat-ayat tersebut memenuhi unsur *Parrhesia* berupa

⁴³ Ibid., 19-20.

⁴⁴ Ibid., 7-9.

⁴⁵ Ibid., 12-13.

keterusterangan, komitmen dalam kebenaran, kritik, risiko, dan tanggung jawab moral sebagaimana dimaksud Foucault.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan kali ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi pustaka dan analisis. Penelitian ini mencoba untuk mencari, mengumpulkan, lalu menganalisis literatur penafsiran HAMKA dalam Tafsir al-Azhar yang mengandung pernyataan sikap politik yang memiliki risiko tindakan represif menggunakan lensa *Parrhesia*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah penafsiran HAMKA dalam Tafsir al-Azhar dan semua pernyataan sikap politik HAMKA dari berbagai macam literatur yang memiliki kaitan dengan topik penelitian.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data inti dalam sebuah penelitian.

Data primer pada penelitian ini adalah penafsiran HAMKA dalam Tafsir al-Azhar yang terdapat pernyataan sikap dengan menggunakan tinjauan *Parrhesia* serta memiliki risiko bagi hidup HAMKA. Adapun data primer untuk *Parrhesia*, penulis menggunakan buku *Parrhesia: Berani Berkata Benar* karya Michel

Foucault. Buku ini telah diterjemahkan oleh Ed. Joseph Pearson dalam bahasa Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian yang memiliki fokus pada penafsiran HAMKA, maka data sekunder yang digunakan adalah seluruh karya HAMKA yang memiliki hubungan dengan topik penelitian. Seperti, *Buku kenang-kenangan hidup Buya HAMKA, Revolusi Ideologi, Revolusi Agama, Ayahku, Falsafah Hidup HAMKA* dan masih banyak lagi. Selain itu, digunakan juga literatur-literatur lain yang membahas penafsiran HAMKA atau pernyataan sikapnya. Adapun data sekunder untuk *Parrhesia*, penulis menggunakan literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan teori *Parrhesia* Michel Foucault. Seperti artikel, jurnal, skripsi, tesis, bahkan disertasi yang juga membahas atau menggunakan *Parrhesia* Foucault sebagai pisau analisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik ini menjadi langkah penting karena kualitas data yang dikumpulkan akan menentukan kualitas hasil penelitian. Dengan teknik yang tepat, data yang diperoleh akan valid, reliabel, dan relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (2017), teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian

kualitatif karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang bermakna dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.⁴⁶

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa langkah dalam mengumpulkan data penelitian.

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka atau *library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, mengorganisir, serta mengolah bahan penelitian. Yakni dengan cara menelaah berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, maupun dokumen relevan lainnya untuk memperoleh landasan teori, konsep, serta hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁷ Dalam konteks ini, maka studi pustaka yang dilakukan adalah dengan menganalisis penafsiran (khususnya penafsiran HAMKA) serta dokumen pendukung lainnya seperti, hasil penelitian tentang HAMKA dan tafsir al-Azhar, karya-karya HAMKA dan lain yang sejenis.

b. Tahap identifikasi

Setelah dibaca, dicatat, dan dikumpulkan, selanjutnya data akan masuk tahap identifikasi. Yakni memfilter data (penafsiran HAMKA) dengan menggunakan pisau analisis milik Foucault bernama *Parrhesia*. Lebih jelasnya, yakni mengidentifikasi dan menjustifikasi penafsiran HAMKA yang mengandung pernyataan

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 157.

⁴⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

sikap politik serta menimbulkan risiko ancaman, pengasingan, dan tindakan represif.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan melalui prosedur atau teknik pengumpulan data, data akan masuk tahap analisis. Lexy J. Moleong menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja sesuai dengan data yang disarankan.⁴⁸ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yakni berupaya menggambarkan, menampilkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.⁴⁹ Analisis dilakukan melalui beberapa langkah: *Pertama*, menampilkan dan mendeskripsikan bagian-bagian Tafsir al-Azhar yang mengandung wacana berupa pernyataan sikap politik HAMKA pada masa itu. *Kedua*, menganalisisnya dan mengelompokkannya dengan menggunakan lensa *Parrhesia* Foucault yang meliputi:

- a. Keterusterangan, yakni mengidentifikasi keterusterangan sikap HAMKA dalam menyampaikan sesuatu yang diyakininya benar tanpa menyembunyikan apa pun.⁵⁰
- b. Kebenaran, yakni mengidentifikasi sejauh mana HAMKA mengikatkan dirinya pada pernyataan sikap yang disampaikan dalam tafsirnya. Yang diuji dalam penelitian ini bukanlah apakah

⁴⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 280.

⁴⁹ Ibid., 11.

⁵⁰ Foucault, *Fearless Speech*, 5.

penilaian politik HAMKA benar secara objektif, melainkan apakah HAMKA meyakini pernyataannya sebagai benar, mengikatkan diri pada pernyataan tersebut, dan bersedia menanggung akibat dari pernyataan itu. Titik utamanya adalah komitmen penutur terhadap kebenaran yang diyakininya.

- c. Kritik, mencari objek yang menjadi sasaran oposisi HAMKA dalam tafsir al-Azhar yang mencakup individu yang berkuasa, sistem pemerintahan, dinamika sosial-politik atau ideologi dominan.⁵¹
- d. Tanggung jawab moral, yakni bahwa tanggung jawab moral tidak berarti sikap tersebut lahir dari ruang yang steril atau bebas kepentingan sebagaimana asumsi Analisis Wacana Kritis bahwa bahasa tidak pernah netral. Kritik HAMKA dapat dipahami sebagai tanggung jawab moral-keagamaan yang tetap lahir dari posisi sosial, politik, dan ideologis tertentu, termasuk afiliasinya dengan Muhammadiyah, Masyumi, dan pengalaman konflik politiknya dengan kelompok komunis. Kesiediaan untuk menanggung risiko sosial maupun politik atas pernyataan tersebut dinilai berdasarkan bukti dari luar teks tafsir, seperti pengantar Tafsir al-Azhar, autobiografi, atau pernyataan HAMKA mengenai kewajiban seorang ulama.

Ketiga, memahami situasi sosial-politik dan ideologi masa itu meliputi latar belakang yang memengaruhi penafsiran serta

⁵¹ Ibid., 9-11.

dinamika yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama. Langkah-langkah ini memiliki tujuan agar sikap yang diambil HAMKA benar-benar tepat sesuai dengan konteks masa itu.

Keempat, menyimpulkan dengan menganalisis sejauh mana HAMKA masuk dalam kategori *Parrhesiastes* dengan meninjau kritik yang diutarakan dan risiko yang diterimanya saat menyatakan sikap politik dalam tafsirnya.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah secara universal, serta menjelaskan tentang pentingnya penelitian perihal *Pernyataan Sikap HAMKA* yang berupa kritik ini dalam Tafsir al-Azhar dan membacanya dari sisi *Parrhesia*. Bab ini juga menampilkan permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan, serta daftar pustaka tentatif.

Bab II : Kerangka Teori

Bab ini menjelaskan konsep-konsep dasar dari teori *Parrhesia*. Meliputi *Parrhesia*, ruang lingkup *Parrhesia*, kebenaran menurut *Parrhesia*, dan konsekuensi dalam menyatakan kebenaran.

Bab III : Biografi HAMKA dan Sejarah tafsir al-Azhar

Bab ini menjelaskan secara kompleks mengenai HAMKA, biografi, perjalanan akademik dan sosial-politiknya, karya-karyanya, dan juga mencoba menampilkan kondisi sosial-politik Indonesia yang melingkupi dan memiliki hubungan dengan HAMKA dan tafsir al-Azhar.

Bab IV : Analisis Penafsiran HAMKA dalam Surah al-Maidah

Bab ini menjelaskan tentang analisis penafsiran HAMKA terhadap ayat-ayat yang mengandung konsep *Parrhesia* dan memiliki indikasi *Parrhesia* melalui Analisis Wacana Kritis. Kemudian melihat dampak dan konsekuensi yang diterima HAMKA dalam konteks sosial-politik.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian, yakni berisi tentang hasil analisis yang telah dilakukan menggunakan pisau bedah *Parrhesia*. Lebih tepatnya, bab ini akan menampilkan hasil analisis terhadap Tafsir al-Azhar karya HAMKA dengan menggunakan lensa *Parrhesia* Michel Foucault yang di dalamnya terdapat perlawanan HAMKA, menyuarakan kebenaran, dan kritik yang semuanya dipandang sebagai pernyataan sikap politik HAMKA.

Selain itu, bab ini juga akan menampilkan saran penelitian lanjutan. Baik terhadap tafsir al-Azhar karya HAMKA, atau pun penelitian menggunakan teori *Parrhesia* Michel Foucault.

